



Analisis Indikator Kinerja Utama  
Kelautan dan Perikanan Indonesia  
*Produksi Garam*

Pusat Data, Statistik dan Informasi  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2017





Pusat Data, Statistik dan Informasi  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2017

ISBN 978-602-1278-22-2





Analisis Indikator Kinerja Utama  
Kelautan dan Perikanan Indonesia  
*Produksi Garam*

Pusat Data, Statistik dan Informasi  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2017





## Kata Pengantar

Keseriusan KKP dalam memacu produksi garam rakyat dibuktikan dengan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dilaksanakan di 52 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dimulai tahun 2011.

Petambak garam merupakan salah satu komunitas masyarakat pesisir yang identik dengan ketidakberdayaan, miskin dan terbelakang terutama dari aspek sosial ekonominya. Teknologi tradisional, skala usaha kecil, keterbatasan permodalan dan sulitnya akses informasi dan pasar menyebabkan produk yang mereka hasilkan berdaya saing rendah. Rendahnya pendapatan usaha tani petambak garam menyebabkan petambak garam sulit menerapkan inovasi dan meningkatkan produktivitas usaha mereka. Kondisi ini menyebabkan petambak garam berada dalam lingkaran setan ketidakberdayaan (*poverty trap*). Skala usaha kecil merupakan kendala utama peningkatan produktivitas petambak garam di seluruh wilayah. Permasalahannya terletak pada fragmentasi lahan dan struktur kepemilikan lahan yang timpang. Solusi terbaik mengatasi hal tersebut adalah menggabungkan lahan-lahan kecil tambak garam dalam suatu hamparan pola pengelolaan bersama. Agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produktivitas dan mutu maka inovasi baru diterapkan dalam pengelolaan tambak garam tersebut. Pola pengelolaan usaha tambak garam seperti ini dikenal dengan pola korporatisasi usaha garam.

Korporatisasi usaha garam merupakan strategi solutif untuk meningkatkan produktivitas dan mutu garam rakyat dengan lebih efisien dan optimal. Melalui pola korporatisasi skala usaha garam milik petambak akan meningkat. Demikian pula halnya masukan inovasi teknologi produksi akan mendorong produktivitas dan mutu garam meningkat pula. Tentu saja proses mengubah pola pengelolaan individual menjadi pola korporatisasi tidak saja membutuhkan dukungan teknis semata tetapi memerlukan rekayasa sosial dalam aplikasinya.

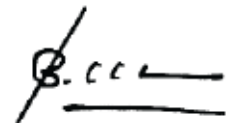
Kajian analisis ini membedah Angka Produksi Garam Nasional dari berbagai segi. Selain menampilkan target dan capaian dari proses implemetasi, juga ditampilkan studi kelayakan ekonomis dari jika hal tersebut diterapkan. Tak lupa pada bagian akhir dicantumkan kajian rekayasa sosial yang perlu dipertimbangkan agar pola ini dapat didukung petambak di wilayah sentra garam. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap semua pihak yang membantu kelancaran proses penyusunan hingga diterbitkannya buku ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut cq. Direktorat Jasa Kelautan melalui Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) terus berupaya meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi sekaligus substitusi garam industri, dapat tercapai swasembada garam secara nasional.

Pada tahun 2016 telah dimulai pembentukan Sentra Bisnis Garam Rakyat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa persoalan dasar yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah belum terintegrasinya kegiatan usaha garam dan belum tersedianya pasar yang bisa melindungi kepentingan petambak garam serta belum terwujudnya pelembagaan usaha di tingkat kabupaten ataupun desa dalam bentuk koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam secara signifikan serta mewujudkan swasembada garam nasional, baik konsumsi maupun industri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2017  
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi,



**Budi Sulisty**

## Executive Summary

*Executive summary* adalah laporan rangkuman singkat berisikan poin-poin utama dari apa yang telah dilakukan serta berbagai hasil yang diperoleh dari kegiatan Analisis Data KP 2017.





# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
Latar Belakang	1
Tujuan	5
<b>BAB II METODOLOGI</b>	7
Ketersediaan Data	7
Metode Analisis	7
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	9
Gambaran Umum Kondisi Pergaraman Nasional 2011 – 2016	9
Gambaran Umum Program PUGaR 2017	25
Gudang Garam	29
Kondisi Prakiraan Cuaca	30
<b>BAB IV TARGET PRODUKSI DAN REALISASI PUGaR 2017</b>	33
Kualitas Garam	35
Kebijakan Pergaraman	36

Hirarki Pertama	40
Hirarki Kedua	40
Hirarki Ketiga	40
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>43</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1.	Perbandingan panjang garis pantai dan volume Produksi Garam 2016 Di Beberapa Negara Produsen Garam	2
Tabel 2.	Perkembangan produksi dan kebutuhan garam tahun 2011-2017 (ton)	3
Tabel 3.	Realisasi Volume Impor Garam Industri (dalam Ton)	3
Tabel 4.	Kabupaten/kota penghasil garam	9
Tabel 5.	Rata-Rata luas lahan produksi garam periode 2011-2016	10
Tabel 6.	Perkembangan luas lahan garam per Provinsi Tahun 2011-2016 (hektar)	11
Tabel 7.	Luas lahan garam menurut kabupaten/kota (dalam Hektar)	13
Tabel 8.	Perkembangan Produksi Garam per Provinsi Tahun 2011-2016 (ton)	18
Tabel 9.	Produksi garam rakyat menurut kabupaten/kota Tahun 2011-2016 (ton)	20
Tabel 10.	Kontribusi produksi garam per daerah Tahun 2011-2016 (%)	22
Tabel 11.	Produktivitas garam Indonesia per kabupaten/kota 2011-2016 (ton/hektar)	24
Tabel 12.	Luas, Desa dan Koperasi Pengelola Lahan Integrasi 2017	27
Tabel 13.	Distribusi jenis bantuan per kabupaten PUGaR 2017	30
Tabel 14.	Prakiraan Musim Kemarau	32

Tabel 15. Target Produksi Dan Realisasi Luas Lahan Dan Produksi Per Kabupaten	34
Tabel 16. Ketercapaian target	35

## Daftar Gambar

Gambar 1.	Pertumbuhan dan Kontribusi Subkategori Industri Makanan dan Minuman	4
Gambar 2.	Grafik kontribusi luas lahan garam per propinsi di wilayah Indonesia Barat	11
Gambar 3.	Kontribusi luas lahan garam per propinsi di wilayah timur Indonesia	12
Gambar 4.	Kontribusi produksi dan luas lahan per propinsi tahun 2011-2016 (%)	15
Gambar 5.	Perkembangan produksi garam wilayah barat Indonesia	16
Gambar 6.	Perkembangan kontribusi produksi garam wilayah barat Indonesia	16
Gambar 7.	Perkembangan produksi garam wilayah timur Indonesia	17
Gambar 8.	Perkembangan kontribusi produksi garam wilayah timur Indonesia	17
Gambar 9.	Peta sebaran lahan tambak garam	26
Gambar 10.	Peta luas lahan integrasi tahun 2017	26
Gambar 11.	Lahan integrasi di Kabupaten Indramayu	28
Gambar 12.	Lahan integrasi di Kabupaten Brebes	28
Gambar 13.	Proses Pembangunan Gudang dan Sarana Pendukung	29
Gambar 14.	Peta Prakiraan dan Kondisi Ekisting Kemarau 2017	31

Gambar 15. Persyaratan mutu garam konsumsi Analisis Indikator Kinerja  
Utama Kelautan dan Perikanan Indonesia Produksi Garam

36

# Daftar Lampiran





# Bab I

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Garam adalah salah satu komoditi yang strategis, karena hampir semua lini kehidupan membutuhkannya. Garam menurut Peraturan Menteri Perindustrian No. 88/M-IND/PER/10/2014 terdiri atas garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi merupakan garam yang digunakan untuk konsumsi atau garam beryodium yang diolah untuk dikonsumsi dan garam diet. Sementara garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong yang digunakan pada proses produksi pada industri kimia, industri aneka pangan, industri farmasi, industri perminyakan, industri penyamakan kulit, serta *water treatment*. Selain itu, garam di dunia menurut ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) yaitu sebuah nomenklatur klasifikasi barang yang bertujuan untuk menyederhanakan transaksi perdagangan intra-ASEAN melalui suatu nomenklatur yang seragam dikelompokkan menjadi empat jenis : 1) Garam meja/*table salt* (HS:2501.00.10), 2) *Rock salt* (HS:2501.00.20), 3) *Sea water* (HS:2501.00.50) dan *other* (HS:2501.00.90) (Kemenkeu, 2016).

Kekurangan produk garam dalam negeri untuk memenuhi konsumsi yang terus meningkat telah menjadi isu strategis sejalan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan nasional. Kebutuhan garam nasional setiap tahun meningkat rata-rata 2-4 persen. Kebutuhan garam nasional pada tahun 2011 berdasarkan

data kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 3,228 juta ton. Kebutuhan tersebut meliputi untuk memenuhi garam konsumsi dan garam industri. Kebutuhan garam nasional tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga kekurangan kebutuhan dipenuhi melalui impor.

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki garis pantai mencapai lebih dari 95.181 kilometer (km). Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas lautan tiga per empat dari luas daratan, dan dengan bertambah panjangnya garis pantai tersebut menyimpan potensi kelautan yang sangat besar. Salah satu produk kelautan yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah garam “namun demikian tidak berarti semua lokasi sepanjang pantai menjadi otomatis cocok untuk dijadikan tambak garam”. Sebagaimana diketahui bahwa garam banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. selain untuk konsumsi, juga digunakan sebagai bahan baku industri terutama Industri Kimia Chlor Alkali.

Tabel 1. Perbandingan panjang garis pantai dan volume Produksi Garam 2016 Di Beberapa Negara Produsen Garam

No	Negara	Panjang Garis Pantai (km)	Produksi Garam (000 metrik ton)
1	Indonesia	95.181	300
2	Cambodia	1.127	140
3	Philipine	33.900	140
4	Vietnam	11.409	1.200
5	Australia	66.530	11.000
6	China	30.017	70.000
7	India	7.517	16.000

Sumber : <http://www.indexmundi.com/minerals/?product=salt>

Kandungan natrium klorida (NaCl) yang ada di dalam garam merupakan unsur penting. Setiap industri memiliki standar minimal kadar NaCl tersendiri yang dibutuhkan dalam proses produksinya. Misalnya garam konsumsi yang peruntukannya sebagai garam rumah tangga membutuhkan kadar NaCl minimal 94%, garam diet kadar NaCl maksimal 60%, sementara untuk memenuhi kebutuhan dunia industri membutuhkan kadar NaCl minimal 96% pada industri kimia, kadar NaCl minimal 97% pada industri aneka pangan, kadar NaCl minimal 99,8% pada industri farmasi, kadar NaCl minimal 95% pada industri perminyakan, kadar NaCl minimal 85% pada industri penyamakan kulit, dan *water treatment*. Selain kadar NaCl, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan garam, seperti kadar kalsium, magnesium, kadar air, cemaran logam dan lain-lain.

Kebutuhan garam dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tabel 2 berikut menyajikan kebutuhan garam dan kemampuan produksi garam dalam negeri.

Tabel 2. Perkembangan produksi dan kebutuhan garam tahun 2011-2017 (ton)

Tahun	Produksi	Kebutuhan
2011	1,113,118	3,228,750
2012	2,017,601	3,270,086
2013	1,087,715	3,573,954
2014	2,192,168	3,611,990
2015	3,246,211	3,598,180
2016	144,009	3,663,982
2017	1,305,606	3,941,167

Sumber : Neraca garam nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah)

Pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa produksi garam di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2017 masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilakukan impor garam dari negara lain, terutama Australia dan India.

Berdasarkan data realisasi volume impor garam Industri dalam Tabel 3, sejak tahun 2013 ke 2016 yakni masa peralihan lahirnya Kebijakan Kluster Garam terlihat indikasi volume importasi yang sangat signifikan terutama untuk garam CAP dan Aneka Pangan, kondisi ini bagi beberapa kalangan dicurigai penyebab terjadinya perembesan garam industri ke garam konsumsi.

Tabel 3. Realisasi Volume Impor Garam Industri (dalam Ton)

No	Industri	2013	2014	2015	2016
1	Aneka Pangan	73.900	372.265	254.674	142.325 270.000
2	Farmasi	708,1	1.444,5	2.456	479,95 3.021,68
3	Cap	884.011	636.664,7	1.463.727	59.178 1.578.675,08
4	Industri Lain	73.886,3	36.036,5	45	0 196,50
	TOTAL	1.032.505	1.046.411	1.720.902	1.851.893

Namun jika ditelusuri dari data pertumbuhan tahunan industri Aneka Pangan, seperti pada Gambar 1, masih terlihat kewajaran pada angka pertumbuhan impor dengan pertumbuhan tahunan industri Makanan dan Minuman.



Gambar 1. Pertumbuhan dan Kontribusi Subkategori Industri Makanan dan Minuman

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) di Tahun 2011, produksi garam nasional terus mengalami peningkatan, namun tahun 2016 seiring dengan kejadian fenomena La Nina, yaitu fenomena angin basah yang menyebabkan periode musim hujan lebih panjang, berdampak pada penurunan yang signifikan terhadap volume produksi garam nasional.

Pada dasarnya program pemberdayaan usaha garam rakyat yang dilaksanakan sejak tahun 2011 dapat dikelompokkan atas 3 fase, yakni: Fase Pemberdayaan, Fase Pengembangan dan Fase Kemandirian.

Fase pemberdayaan telah dilalui melalui pemberdayaan pada petambak perorangan yang terhimpun dalam kelompok – kelompok dari seribuan kelompok hingga tiga ribuan kelompok. Melihat jumlah partisipasi yang hampir tiga kali lipat dari awal program ini diluncurkan, program ini menunjukkan keberhasilannya dalam membangun partisipasi masyarakat petambak garam yang pada akhirnya meningkatkan produksinasional.

Fase Pengembangan dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan kondisi yang sangat signifikan, dengan jumlah partisipasi masyarakat stabil namun terjadi perluasan lahan dan jumlah produksi garam yang meningkat 100% dari produksi garam pada fase pemberdayaan.

Fase kemandirian, adalah fase dimana sistem *market linked* yang direkayasa dengan membangun gudang garam nasional dengan sistem resi gudang diharapkan mampu menjadi support sistem kekuatan harga jual garam petambak ternyata belum dapat di implementasikan, dikarenakan produksi garam nasional yang anjlok dikarenakan panjangnya musim hujan dalam satu tahun. Di dalam fase kemandirian

ini, selain gudang garam nasional, integrasi lahan tambak garam rakyat menjadi andalan support sistem dalam peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas garam rakyat. Integrasi lahan tambak dimaksudkan menggabungkan petak-petak lahan tambak rakyat yang kecil-kecil menjadi satu kesatuan unit lahan tambak seluas 15 ha. Dengan adanya integrasi lahan ini, diharapkan produktivitas garam meningkat, karena supply air baku yang kontinu, dan kualitasnya meningkat serta seragam.

Produksi garam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Produksi garam di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan penguapan air laut yang dialirkan ke tambak garam dan perebusan. Di negara lain proses pembuatan garam dapat dilakukan dengan cara menggali suatu lahan seperti dalam pertambangan. Proses produksi garam dengan cara penguapan air laut banyak dipengaruhi oleh perubahan cuaca di daerah produksi garam tersebut. Proses percepatan penguapan air laut menjadi garam dapat dilakukan dengan menggunakan teknik ulir, geomembran, rumah prisma, dan lain lain.

## Tujuan

Tujuan Analisis Produksi Garam adalah untuk menginformasikan perkembangan produksi dan produktivitas garam nasional, serta kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor pergaraman nasional;



# Bab II

## Metodologi

### Ketersediaan Data

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari beberapa kementerian/lembaga terkait, diantaranya : 1) Data primer terkait jumlah produksi, luasan lahan, harga jual garam, kualitas garam, kelompok petambak garam, dan sarana prasarana tambak garam diperoleh melalui Pendataan Garam yang dilakukan di 52 kabupaten/kota, dari PT. Garam, PT. Sucofindo dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota; 2) Data sekunder terkait data prakiraan cuaca diperoleh dari BMKG, data kebutuhan garam industri dan konsumsi diperoleh dari BPS dan Kementerian Perindustrian, serta data impor garam diperoleh dari Kementerian Perdagangan.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan pendekatan deskriptif dapat menggambarkan perkembangan produksi garam Indonesia. Gambaran tersebut dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dijadikan dasar dalam kebijakan pergaraman di Indonesia.





# Bab III

## Gambaran Umum

### Gambaran Umum Kondisi Pergaraman Nasional 2011 – 2016

#### 1. Daerah penghasil garam

Garam di Indonesia dihasilkan di 9 Provinsi yang tersebar di 52 kabupaten/kota. Dari 52 kabupaten/kota penghasil garam terdiri atas 10 sentra garam dan selebihnya merupakan wilayah penyangga. Sentra pergaraman di 10 kabupaten ini, merupakan wilayah yang memiliki kontribusi terbesar dalam produksi garam nasional. Kabupaten/kota penghasil garam disajikan dalam Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Kabupaten/kota penghasil garam

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Aceh Besar	28	Karangasem
2	Aceh Timur	29	Buleleng
3	Aceh Utara	30	Lombok Barat
4	Pidie	31	Lombok Tengah
5	Bireuen	32	Lombok Timur
6	Pidie Jaya	33	Sumbawa
7	Karawang	34	Bima
8	Indramayu	35	Kota Bima
9	Cirebon	36	Manggarai
10	Brebes	37	Nagekeo
11	Demak	38	Ende
12	Jepara	39	Sabu Raijua
13	Pati	40	Flores Timur
14	Rembang	41	Lembata

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
15	Tuban	42	Alor
16	Lamongan	43	Sumba Timur
17	Gresik	44	Kupang
18	Sidoarjo	45	Timor Tengah Utara
19	Kota Surabaya	46	Minahasa Tenggara
20	Pasuruan	47	Pohuwato
21	Kota Pasuruan	48	Kota Palu
22	Probolinggo	49	Pangkajene Kepulauan
23	Bangkalan	50	Takalar
24	Sampang	51	Jeneponto
25	Pamekasan	52	Selayar
26	Sumenep		
27	Klungkung		

Daerah penghasil garam yang ada di Indonesia terdapat pada 9 provinsi. Secara rata-rata dari 2011-2016 luas lahan garam di Indonesia disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-Rata luas lahan produksi garam periode 2011-2016

No	Propinsi	Jumlah Luas lahan periode 2011 -2016 (ton)	Rata-rata luas lahan (ton)	Kontribusi rata-rata luas lahan (%)
1	D.I Aceh	0,00	0,00	0,00
2	Jawa Barat	32.561,75	5.426,96	22,25
3	Jawa Tengah	35.676,40	5.946,07	24,38
4	Jawa Timur	55.246,55	9.207,76	37,76
5	Bali	620,15	103,36	0,42
6	NTB	12.177,08	2.029,51	8,32
7	NTT	1.713,86	285,64	1,17
8	Silawesi Tenggara	299,10	49,85	0,20
9	Sulawesi Selatan	8.020,23	1.336,71	5,48
	<b>Total</b>	<b>146.315,12</b>	<b>2.709,54</b>	<b>100,00</b>

Pada Tabel 5 disajikan rata – rata luas lahan garam yang digunakan dalam produksi garam nasional selama 2011-2016. Propinsi yang menyumbang lahan produksinya lebih besar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berdasarkan Tabel 5 propinsi lainnya memiliki kontribusi luas lahan di bawah 10%.

Perkembangan luas lahan garam per provinsi di Indonesia selama periode 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan luas lahan garam per Provinsi Tahun 2011-2016 (hektar)

No	Propinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	D.I Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Jawa Barat	3.500	5.571	7.136	6.744	6.733	2.878
3	Jawa Tengah	6.138	6.482	7.076	6.585	6.609	2.787
4	Jawa Timur	10.313	10.355	10.523	9.757	8.769	5.530
5	Bali	90	150	150	174	33	23
6	NTB	2.247	2.187	2.281	2.562	2.336	564
7	NTT	213	336	287	324	334	221
8	Suawesi Tenggara	101	18	18	18	87	57
9	Sulawesi Selatan	1.513	1.802	1.647	1.583	975	500
	<b>Total</b>	<b>24.116</b>	<b>26.900</b>	<b>29.117</b>	<b>27.748</b>	<b>25.875</b>	<b>12.560</b>

Sumber: KKP dalam angka 2016

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa luas lahan yang digunakan dalam produksi garam nasional selalu berfluktuasi.

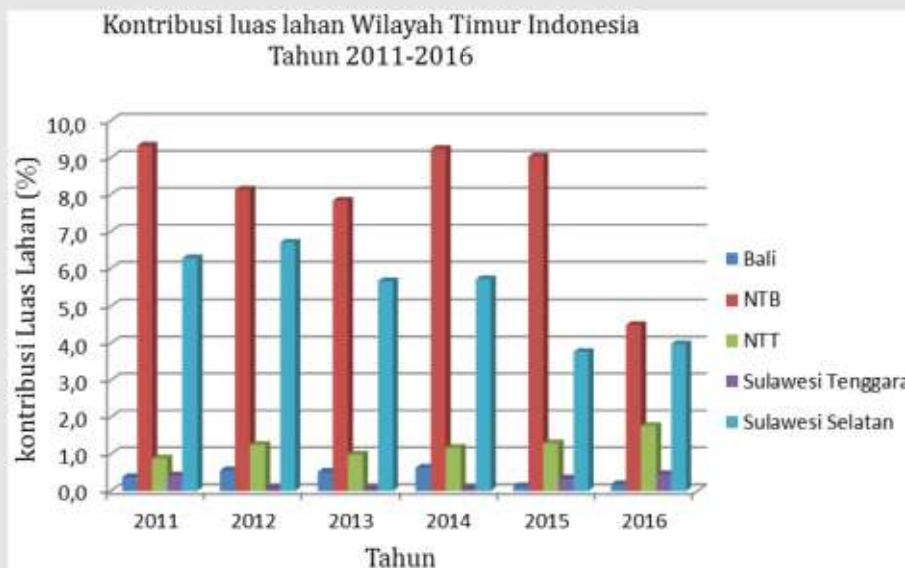
Berdasarkan pada segi kontribusi lahan per propinsi terhadap lahan garam secara nasional dapat disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Pada Gambar 2 menyajikan perkembangan kontribusi wilayah barat Indonesia terhadap produksi garam Indonesia. Pada wilayah barat Indonesia memiliki kontribusi yang terbesar dengan maksimal sampai 44% (2016) yaitu Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2. Grafik kontribusi luas lahan garam per propinsi di wilayah Indonesia Barat

Propinsi Jawa Timur memiliki kontribusi luas lahan produksi garmnya secara rata-rata antara 33,9% sampai 44%. Pada tahun 2016 kontribusi luas lahan propinsi Jawa Timur mencapai yang tertinggi yaitu 44%. Berdasarkan pada Gambar 3 kontribusi luas lahan produksi garam untuk Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak ada perbedaan yang besar. Luas lahan di Jawa Barat pada tahun 2011 berkontribusi sekitar 14% kemudian meningkat dan berfluktuasi sekitar 20%(2012)-25%(2016). Fluktuasi kontribusi luas lahan produksi garam dari Jawa Tengah sekitar 20%(2011)-25%(2016).

Pada Gambar 3 menyajikan kontribusi luas lahan garam wilayah timur Indonesia terhadap produksi garam nasional. Pada bagian wilayah timur Indonesia kontribusi luas lahan terhadap lahan nasional terdapat 2 propinsi yang memiliki rentang fluktuasi yang lebar, yaitu Propinsi NTB dan Sulawesi Selatan. Di Propinsi NTB titik terendah kontribusi luas lahannya sebesar 4,5% (2016) dan yang tertinggi 9,3% (2011). Propinsi Sulawesi Selatan memiliki kontribusi luas lahan terendah sekitar 3,8% (2015) dan yang tertinggi sekitar 6,7% (2012). Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa selama periode 2011-2016 Propinsi NTB memiliki rentang yang terlebar yaitu sekitar 4,8% untuk wilayah timur Indonesia. Propinsi NTT memiliki kontribusi luas lahan yang konstan selama periode 2011-2016 dan cenderung meningkat. Sementara Propinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan.



Gambar3. Kontribusi luas lahan garam per propinsi di wilayah timur Indonesia

Berdasarkan pada Tabel 7 terdapat 5 kabupaten yang memiliki luas lahan terbesar yaitu Sampang, Cirebon, Pati, Indramayu dan Sumenep. Rata-rata luas lahan yang digunakan oleh kelima kabupaten tersebut sekitar 1.914,62 hektar sampai 3.347,73 hektar. Kontribusi kabupaten/kota dengan luas lahan terbesar di Indonesia adalah Sampang sebesar 3.347,73(13,59%), Cirebon sebesar 2.939,88 (11,93%), Pati sebesar 2.402,16(9,75%), Indramayu sebesar 2.310,36 (9,38%) dan Sumenep sebesar 1.914,62 (7,77%) . Sementara kabupaten yang memiliki luas lahan terkecil adalah Minahasa Tenggara dan Selayar dengan luas lahan 7 hektar dan 10.03 hektar.

Tabel 7. Luas lahan garam menurut kabupaten/kota (dalam Hektar)

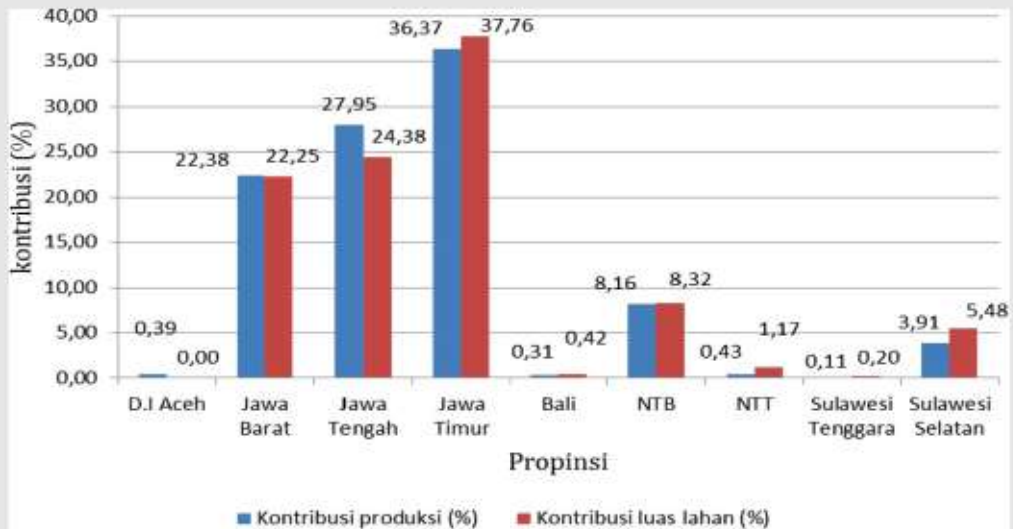
No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Besar	0	0	0	0	0	0
2	Aceh Timur	0	0	0	0	0	0
3	Aceh Utara	0	0	0	0	0	0
4	Pidie	0	0	0	0	0	0
5	Bireuen	0	0	0	0	0	0
6	Pidie Jaya	0	0	0	0	0	0
7	Karawang	0	289	245	172	161	193
8	Indramayu	1.996	2.194	2.617	2.714	2.714	1.627
9	Cirebon	1.504	3.088	4.274	3.858	3.858	1.058
10	Brebes	352	540	665	308	430	396
11	Demak	790	1.026	1.092	1.173	1.271	1.101
12	Jepara	636	636	753	733	501	447
13	Pati	2.776	2.565	2.829	2.829	2.838	576
14	Rembang	1.584	1.714	1.737	1.543	1.569	267
15	Tuban	224	267	268	267	272	197
16	Lamongan	466	358	372	372	213	188
17	Gresik	202	225	152	112	164	32
18	Sidoarjo	0	0	0	0	243	107
19	Kota Surabaya	1.490	1.490	1.470	1.470	895	179
20	Pasuruan	156	215	245	273	267	154
21	Kota Pasuruan	109	122	128	127	116	127
22	Probolinggo	370	379	379	382	360	309
23	Bangkalan	116	160	160	160	179	211
24	Sampang	4.200	4.200	3.208	3.208	3.065	2.206
25	Pamekasan	892	960	2.005	1.000	929	989
26	Sumenep	2.088	1.977	2.136	2.386	2.068	832
27	Karangasem	0	0	0	0	0	0
28	Buleleng	90	150	150	174	33	23

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
29	Lombok Barat	270	75	155	132	142	15
30	Lombok Tengah	0	34	58	58	56	8
31	Lombok Timur	193	208	196	244	264	49
32	Sumbawa	35	89	100	355	102	55
33	Bima	1.723	1.732	1.733	1.733	1.743	432
34	Kota Bima	26	48	40	40	29	6
35	Manggarai	21	22	21	15	10	2
36	Nagekeo	35	35	48	96	180	11
37	Ende	18	23	22	28	22	7
38	Flores Timur	0	0	0	0	0	0
39	Lembata	2	0	0	0	0	33
40	Alor	18	18	17	17	17	2
41	Sumba Timur	22	37	38	70	42	86
42	Kupang	83	189	40	54	55	40
43	Timor Tengah Utara	14	12	100	44	8	0
44	Sabu Raijua	0	0	0	0	0	39
45	Minahasa Tenggara	7	0	0	0	0	0
46	Pohuwato	75	0	0	0	87	7
47	Kota Palu	19	18	18	18	0	50
48	Pangkajene Kepulauan	547	836	672	580	421	203
49	Takalar	156	156	165	181	104	106
50	Jeneponto	810	810	810	810	435	188
51	Selayar	0	0	0	12	15	3
<b>TOTAL</b>		<b>24.116</b>	<b>26.900</b>	<b>29.117</b>	<b>27.748</b>	<b>25.875</b>	<b>12.560</b>

Sumber : KKP dalam angka 2016 (diolah)

## 2. Produksi Garam Indonesia

Perkembangan antara rata-rata produksi per propinsi dan rata-rata luas lahan per propinsi dapat ditampilkan pada Gambar 4. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa selama periode 2011-2016 perkembangan kontribusi produksi dengan kontribusi luas lahan bergerak searah. Berdasarkan pada Gambar 4 ditunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah kontribusi produksinya lebih besar daripada kontribusi luas lahan yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan produktivitas usaha garam di kedua propinsi tersebut. Sedangkan Propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi produksi yang lebih kecil daripada kontribusi luas lahannya.

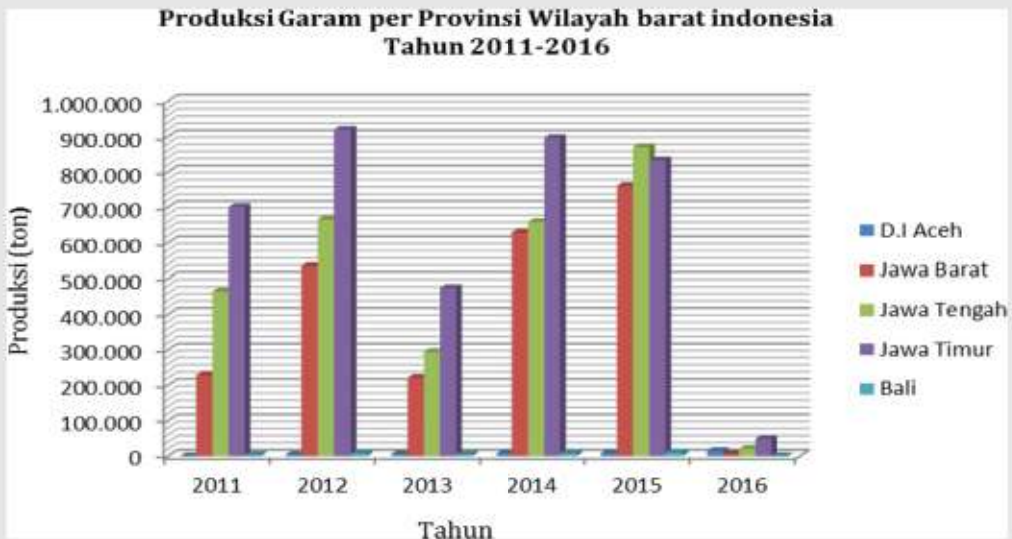


Gambar 4. Kontribusi produksi dan luas lahan per propinsi tahun 2011-2016 (%)

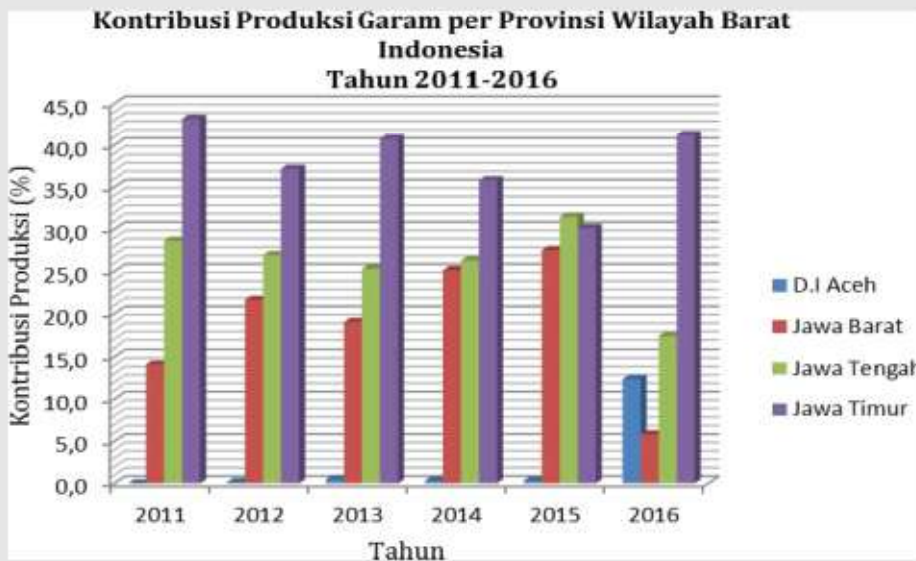
Perkembangan produksi garam untuk wilayah barat Indonesia disajikan pada Gambar 4. Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur selalu menempati peringkat pertama dalam produksi garam nasional selama periode 2011 -2016, kecuali pada musim produksi tahun 2015 yang berada di urutan kedua setelah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 produksi garam sangat menurun drastis. Hal ini disebabkan adanya anomali cuaca yang cenderung kemarau basah.

Keragaman produksi di wilayah Barat Indonesia pada periode 2011 – 2016 memiliki perbedaan yang lebar antar propinsi. Ini terlihat pada Gambar 4, produksi terendah di Jawa Barat dan produksi tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2015 provinsi Jawa Timur mengalami penurunan produksi sedangkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami peningkatan produksi.





Gambar 5. Perkembangan produksi garam wilayah barat Indonesia



Gambar 6. Perkembangan kontribusi produksi garam wilayah barat Indonesia

Pada Gambar 6 disajikan perkembangan kontribusi produksi garam untuk wilayah barat Indonesia. Selama periode 2011-2016 tersebut provinsi Jawa Timur berkontribusi rata – rata 38% dengan kontribusi tertinggi di tahun 2011 (43,2%) dan kontribusi terendah di tahun 2015 (30,1%). Gangguan cuaca pada tahun 2016



berdampak besar bagi Jawa Barat sehingga kontribusi produksinya untuk wilayah barat Indonesia menjadi terendah.

Perkembangan produksi garam untuk wilayah timur Indonesia disajikan pada Gambar 6. Pada gambar 6 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati peringkat pertama di wilayah timur selama periode 2011-2016. Pada Gambar 7 disajikan perkembangan kontribusi produksi garam untuk wilayah timur Indonesia. Selama periode 2011-2016 tersebut Propinsi NTB berkontribusi sekitar 6-10% untuk wilayah timur Indonesia.



Gambar 7. Perkembangan produksi garam wilayah timur Indonesia



Gambar 8. Perkembangan kontribusi produksi garam wilayah timur Indonesia

Pada Tabel 8 ditampilkan perkembangan produksi garam Indonesia. Secara rata-rata produksi garam Propinsi Jawa Timur adalah yang terbesar di Indonesia. Produksi terbesar lainnya dengan jumlah produksi di atas 100.000 ton per tahunnya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat dan NTB.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Garam per Provinsi Tahun 2011-2016 (ton)

No	Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata produksi per tahun
1	D.I Aceh	0	3.621	6.014	8.094	9.136	14.595	6.910,15
2	Jawa Barat	228.717	535.249	221.430	629.403	760.897	6.851	397.091,27
3	Jawa Tengah	464.887	666.282	294.621	658.813	869.982	20.478	495.843,72
4	Jawa Timur	701.047	919.261	474.435	896.207	832.798	48.634	645.397,01
5	Bali	3.339	6.775	4.308	7.674	10.548	500	5.524,11
6	NTB	135.789	230.096	118.462	198.210	175.197	10.501	144.709,25
7	NTT	5.962	11.858	3.726	7.206	7.569	8.946	7.544,47
8	Sulawesi Tenggara	3.224	1.350	1.251	1.124	710	3.763	1.903,63
9	Sulawesi Selatan	80.820	99.223	39.359	96.161	97.108	3.787	69.409,78
	<b>Total</b>	<b>1.623.786</b>	<b>2.473.716</b>	<b>1.163.608</b>	<b>2.502.891</b>	<b>2.763.945</b>	<b>118.055</b>	<b>1.774.333,40</b>

Sumber : KKP dalam angka 2016

Berdasarkan gambaran perkembangan produksi tersebut bahwa dengan kontribusi luas lahan di atas 10% (luas rata – rata 9.207,76 Ha) maka propinsi Jawa Timur tetap konstan memproduksi garam yang terbesar di Indonesia. Pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan kontribusi luas lahan di atas 10% (luas rata – rata propinsi Jawa Tengah 5.946,07 Ha dan luas rata – rata propinsi Jawa Barat 5.426,96 Ha) menempati urutan kedua dan ketiga terbesar dalam produksi garam nasional Indonesia. Pada Propinsi NTB dan Propinsi Sulawesi Selatan menempati urutan keempat dan kelima dalam produksi garam nasional Indonesia.

Produksi garam untuk setiap kabupaten/kota terdapat beberapa kabupaten/kota yang konstan memproduksi di atas 100.000 ton selama periode 2011-2016. Kabupaten/kota tersebut terdiri dari Kabupaten Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep dan Bima. Berdasarkan Tabel 8 maka kabupaten/kota yang terletak di Pulau Jawa di bagian utara memproduksi secara

konstan di atas 100.000 ton per tahun selama periode 2011-2015 sedangkan kabupaten/kota diluar Pulau Jawa hanya terdapat 1 kabupaten yang secara konstan berproduksi diatas 100.000ton yaitu: Kabupaten Bima.

Di Propinsi D.I Aceh pada tahun 2016 terdapat Kabupaten Bireun berhasil memproduksi garam dalam kuantitas tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Propinsi D.I Aceh. Jika dilihat selama periode 2011-2016 bahwa Kabupaten Pidie dan Aceh Utara sebagai penghasil utama garam di D.I Aceh. Selama periode 2012-2016 produksi dari Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara dilakuan secara konstan selama periode tersebut. Kabupaten Aceh Besar dan Pidie mulai berproduksi pada tahun 2013 dan tetap konstan berproduksi sampai tahun 2016.

Selama periode 2011-2016 Kabupaten Cirebon dan Indramayu selalu memproduksi garam, sementara Karawang tidak selalu menghasilkan garam. Rata-rata produksi garam pada ketiga kabupaten tersebut sekitar antara 7.000 ton sampai 219.000 ton. Kabupaten Cirebon menempati peringkat pertama sebagai penghasil garam untuk wilayah Jawa Barat. Ketidak konsistenan produksi garam terdapat pada Kabupaten Karawang. Hal tersebut ditunjukkan tidak adanya data produksi pada tahun 2011 dan 2016.

Propinsi Jawa Tengah selama periode 2011-2016 selalu memproduksi garam. Rata-rata produksi garam yang tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Pati dan yang terendah di wilayah Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes. Kabupaten Pati dan Rembang adalah kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang konsisten memproduksi garam di atas 100.000 ton sedangkan Kabupaten Demak sudah mulai dapat memproduksi garam di atas 100.000 ton mulai tahun 2014.

Propinsi Jawa Timur terdapat wilayah baru yang dapat memproduksi garam yaitu Kabupaten Sidoarjo. Di Jawa Timur terdapat 3 kabupaten/kota yang memproduksi garam terbesar di Propinsi Jawa Timur, yaitu : Kabupaten Sampang, Sumenep dan Kota Surabaya. Kabupaten Sampang secara rata-rata dapat memproduksi garam sekitar 238.000 ton yang merupakan rata-rata tertinggi diantara seluruh wilayah penghasil garam di Indonesia. Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terendah dalam memproduksi garam yaitu rata-rata sekitar 3.000 ton.

Tabel 9. Produksi garam rakyat menurut kabupaten/kota Tahun 2011-2016 (ton)

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Besar	0	0	159	442	800	778
2	Aceh Timur	0	252	221	661	555	840
3	Aceh Utara	0	3.369	2.355	2.970	1.781	2.377
4	Pidie	0	0	3.279	4.020	6.000	3.744
5	Bireuen	0	0	0	0	0	6.277
6	Pidie Jaya	0	0	0	0	0	579
7	Karawang	0	15.043	1.284	3.736	8.446	0
8	Indramayu	140.117	230.626	36.100	311.187	314.893	6.259
9	Cirebon	88.600	289.581	184.046	314.480	437.558	592
10	Brebes	26.460	47.622	14.413	25.461	53.630	136
11	Demak	55.482	90.802	20.027	105.587	130.118	4.691
12	Jepara	44.961	53.343	14.962	72.872	56.614	4.415
13	Pati	204.616	269.802	121.610	287.997	381.704	6.253
14	Rembang	118.316	184.159	107.121	141.943	218.491	1.726
15	Tuban	15.051	20.554	16.489	24.952	29.425	3.258
16	Lamongan	34.620	30.124	10.880	32.810	38.804	2.957
17	Gresik	11.390	14.445	4.149	8.665	16.536	196
18	Sidoarjo	0	0	0	0	5.459	577
19	Kota Surabaya	77.694	131.834	62.635	156.221	86.227	2.269
20	Pasuruan	7.658	15.569	10.593	16.087	19.354	870
21	Kota Pasuruan	4.861	12.212	3.764	10.760	12.490	1.500
22	Probolinggo	20.354	31.147	11.515	25.149	23.005	5.041
23	Bangkalan	3.515	6.500	5.117	8.642	9.500	8.110
24	Sampang	321.441	351.540	169.960	256.540	326.736	7.124
25	Pamekasan	65.239	112.003	77.593	89.283	123.535	9.830
26	Sumenep	154.275	213.887	118.228	292.052	171.153	10.162
27	Klungkung	0	0	0	0	0	60
28	Karangasem	616	920	579	1.431	720	235
29	Buleleng	2.723	5.855	3.730	6.244	9.827	205
30	Lombok Barat	2.225	5.128	5.754	9.313	4.355	1.402
31	Lombok Tengah	0	2.308	971	2.101	2.788	401
32	Lombok Timur	8.154	11.685	13.106	22.881	10.620	998
33	Sumbawa	2.719	6.118	666	4.559	3.306	513
34	Bima	120.720	199.500	96.492	156.339	152.439	7.184
35	Kota Bima	1.973	5.357	1.473	3.016	1.688	2
36	Manggarai	224	761	216	329	441	108
37	Nagekeo	1.880	2.303	215	1.866	2.479	63
38	Ende	455	921	510	720	36	32
39	Sabu Raijua	0	0	0	0	0	5.271
40	Flores Timur	413	0	0	0	0	474

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
41	Lembata	210	0	0	0	0	175
42	Alor	225	132	206	261	315	0
43	Sumba Timur	404	937	1.285	622	846	325
44	Kupang	1.831	5.940	741	3.146	2.351	1.705
45	Timor Tengah Utara	320	864	553	260	1.101	792
46	Minahasa Tenggara	11	0	0	0	0	0
47	Pohuwato	1.875	0	0	0	710	177
48	Kota Palu	1.338	1.350	1.251	1.124	0	3.586
49	Pangkajene Kepulauan	14.483	29.734	11.952	54.894	42.268	419
50	Takalar	8.604	9.345	4.533	15.957	14.234	209
51	Jeneponto	57.733	60.143	22.874	24.548	40.274	3.154
52	Selayar	0	0	0	762	332	5
<b>Total</b>		<b>1.623.786</b>	<b>2.473.716</b>	<b>1.163.608</b>	<b>2.502.891</b>	<b>2.763.945</b>	<b>118.055</b>

Sumber : KKP dalam angka 2016

Pada tahun 2016 Kabupaten Klungkung adalah daerah baru yang memproduksi garam di Propinsi Bali. Kabupaten Buleleng dan Karangasem secara konsisten dapat memproduksi garam selama periode 2011-2016.

Propinsi NTT selama periode 2011-2016 terdapat daerah yang tidak konsisten dalam memproduksi garam yaitu Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Pada periode tersebut juga terdapat daerah baru penghasil garam yaitu Kabupaten Sabu Raijua. Produksi garam terendah sebesar 192 ton oleh Kabupaten Lembata dan yang tertinggi adalah Kupang. Kabupaten Sabu Raijua meski sebagai daerah baru penghasil garam, namun pada tahun 2016 produksi garamnya terbesar di NTT mengalahkan produksi garam di Kabupaten Kupang.

Minahasa Utara adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara yang tidak konsisten dalam memproduksi garam. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Minahasa Utara hanya berproduksi garam pada tahun 2011.

Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto adalah kabupaten tertinggi dalam memproduksi garam di Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Selayar adalah kabupaten yang terendah dalam memproduksi garam di Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pada Tabel 10 bahwa rata-rata produksinya 10 terbesar terletak di Kabupaten Sampang, Pati, Cirebon, Indramayu, Sumenep, Rembang, Bima, Pamekasan, Kota Surabaya, dan Demak. Berdasarkan 10 peringkat terbesar tersebut hanya Kabupaten Bima saja yang berasal dari luar Pulau Jawa.

Berdasarkan Tabel 10 bahwa pada tahun 2011 terdapat 2 kabupaten yang berkontribusi diatas 10% dalam produksi garam nasional , yaitu : Kabupaten Sampang (19,80%) dan Kabupaten Pati (12,60%). Pada tahun 2012 terdapat 3 kabupaten/kota yang berkontribusi di atas 10% yaitu :Kabupaten Sampang, Cirebon dan Pati. Pada Tahun 2013 kabupaten/kota yang berkontribusi lebih dari 10% menjadi 4 kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Cirebon, Sampang, Pati dan Sumenep. Pada tahun 2014 terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar dalam produksi garam di Indonesia, yaitu : Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pati dan Kabupaten Sampang. Pada tahun 2015 kabupaten/kota yang berkontribusi terbesar dalam produksi garam di Indonesia adalah Kabupaten Cirebon, Pati, Sampang dan Indramayu. Pada tahun 2016 bahwa kontribusi produksi garam setiap kabupaten/kota berada di bawah 9%.

Pada Tabel 10 ditampilkan perkembangan kontribusi produksi per kabupaten/kota di Indonesia dalam produksi garam nasional. Pada Tabel 9 terdapat kabupaten/kota terbesar rata-rata produksinya, yaitu : Sampang, Pati, Cirebon, Sumenep, Indramayu, Bima, Rembang, Pamekasan, Kota Surabaya dan Demak. Daerah-daerah tersebut secara konstan berkontribusi dalam produksi garam nasional selama periode 2011-2016.

Tabel 10. Kontribusi produksi garam per daerah Tahun 2011-2016 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Besar	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,66
2	Aceh Timur	0,00	0,01	0,02	0,03	0,02	0,71
3	Aceh Utara	0,00	0,14	0,20	0,12	0,06	2,01
4	Pidie	0,00	0,00	0,28	0,16	0,22	3,17
5	Bireuen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
6	Pidie Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
7	Karawang	0,00	0,61	0,11	0,15	0,31	0,00
8	Indramayu	8,63	9,32	3,10	12,43	11,39	5,30
9	Cirebon	5,46	11,71	15,82	12,56	15,83	0,50
10	Brebes	1,63	1,93	1,24	1,02	1,94	0,12
11	Demak	3,42	3,67	1,72	4,22	4,71	3,97
12	Jepara	2,77	2,16	1,29	2,91	2,05	3,74

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13	Pati	12,60	10,91	10,45	11,51	13,81	5,30
14	Rembang	7,29	7,44	9,21	5,67	7,91	1,46
15	Taban	0,93	0,83	1,42	1,00	1,06	2,76
16	Lamongan	2,13	1,22	0,94	1,31	1,40	2,50
17	Gresik	0,70	0,58	0,36	0,35	0,60	0,17
18	Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,49
19	Kota Surabaya	4,78	5,33	5,38	6,24	3,12	1,92
20	Pasuruan	0,47	0,63	0,91	0,64	0,70	0,74
21	Kota Pasuruan	0,30	0,49	0,32	0,43	0,45	1,27
22	Probolinggo	1,25	1,26	0,99	1,00	0,83	4,27
23	Bangkalan	0,22	0,26	0,44	0,35	0,34	6,87
24	Sampang	19,80	14,21	14,61	10,25	11,82	6,03
25	Pamekasan	4,02	4,53	6,67	3,57	4,47	8,33
26	Sumenep	9,50	8,65	10,16	11,67	6,19	8,61
27	Klungkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
28	Karangasem	0,04	0,04	0,05	0,06	0,03	0,20
29	Buleleng	0,17	0,24	0,32	0,25	0,36	0,17
30	Lombok Barat	0,14	0,21	0,49	0,37	0,16	1,19
31	Lombok Tengah	0,00	0,09	0,08	0,08	0,10	0,34
32	Lombok Timur	0,50	0,47	1,13	0,91	0,38	0,85
33	Sumbawa	0,17	0,25	0,06	0,18	0,12	0,43
34	Bima	7,43	8,06	8,29	6,25	5,52	6,09
35	Kota Bima	0,12	0,22	0,13	0,12	0,06	0,00
36	Manggarai	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02	0,09
37	Nagekeo	0,12	0,09	0,02	0,07	0,09	0,05
38	Ende	0,03	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03
39	Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
40	Flores Timur	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
41	Lembata	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
42	Alor	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
43	Sumba Timur	0,02	0,04	0,11	0,02	0,03	0,28
44	Kupang	0,11	0,24	0,06	0,13	0,09	1,44
45	Timor Tengah Utara	0,02	0,03	0,05	0,01	0,04	0,67
46	Minahasa Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Pohuwato	0,12	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
48	Kota Palu	0,08	0,05	0,11	0,04	0,00	3,04
49	Pangkajene Kepulauan	0,89	1,20	1,03	2,19	1,53	0,35
50	Takalar	0,53	0,38	0,39	0,64	0,51	0,18
51	Jeneponto	3,56	2,43	1,97	0,98	1,46	2,67
52	Selayar	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan pada Tabel 11 ditampilkan perkembangan produktivitas produksi garam per kabupaten/kota. Pada Tabel tersebut ditunjukkan bahwa secara rata-rata Kota Surabaya, Kabupaten Bima dan Kabupaten Demak menepati peringkat pertama, kedua dan ketiga yang tertinggi produktivitasnya. Produktivitas yang terendah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara nasional produktivitas yang tertinggi adalah pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2016. Pada Tabel 11 selama periode 2011-2016 terdapat daerah-daerah yang memiliki produktivitas yang konstan di atas 100 ton. Kabupaten/kota tersebut adalah Cirebon, Brebes, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Lamongan, Kota Surabaya, Sampang, Sumenep dan Bima.

Tabel 11. Produktivitas garam Indonesia per kabupaten/kota 2011-2016 (ton/hektar)

No	Kabupaten/Kota	Tahun (ton/hektar)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Besar	0,00	0,00	1,42	2,16	3,77	6,48
2	Aceh Timur	0,00	2,50	1,13	3,71	4,30	4,16
3	Aceh Utara	0,00	24,06	9,50	11,12	7,99	12,00
4	Pidie	0,00	0,00	20,62	17,11	25,53	13,52
5	Bireuen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75
6	Pidie Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
7	Karawang	0,00	112,26	4,15	17,22	211,15	0,00
8	Indramayu	139,00	81,87	13,51	544,03	396,09	3,69
9	Cirebon	260,59	78,12	51,84	50,29	563,86	0,48
10	Brebes	147,00	94,49	18,82	213,96	101,76	0,27
11	Demak	284,52	229,88	28,21	733,24	282,25	5,87
12	Jepara	174,27	213,37	26,39	134,70	129,55	11,01
13	Pati	123,04	60,33	150,69	897,19	646,96	6,81
14	Rembang	95,19	51,77	161,08	281,63	617,21	4,20
15	Tuban	45,89	51,51	41,64	378,07	129,63	11,39
16	Lamongan	192,33	122,96	28,86	111,22	138,59	10,71
17	Gresik	237,29	96,95	37,05	192,55	570,20	5,93
18	Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	10,68
19	Kota Surabaya	551,02	418,52	161,85	1.446,49	466,09	40,52
20	Pasuruan	66,59	91,05	51,92	383,02	86,79	12,98
21	Kota Pasuruan	58,57	124,61	31,11	107,60	283,86	15,46
22	Probolinggo	113,08	92,42	21,56	138,94	371,04	11,10
23	Bangkalan	0,00	26,64	20,88	101,67	38,78	54,80
24	Sampang	276,15	117,06	62,95	337,55	185,54	4,76
25	Pamekasan	57,28	83,96	53,04	110,91	200,54	7,91
26	Sumenep	132,31	82,55	33,44	243,17	223,44	12,39



No	Kabupaten/Kota	Tahun (ton/hektar)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
27	Klungkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
28	Karangasem	2,71	3,10	1,71	4,23	3,91	0,96
29	Buleleng	21,79	31,48	14,92	109,54	213,64	2,11
30	Lombok Barat	12,50	22,01	27,14	30,14	311,07	5,25
31	Lombok Tengah	0,00	21,18	5,43	12,43	92,94	5,01
32	Lombok Timur	42,47	24,81	25,25	48,79	461,74	33,26
33	Sumbawa	30,21	31,86	2,96	20,00	14,50	5,70
34	Bima	973,54	184,21	92,34	133,05	1.137,61	11,35
35	Kota Bima	13,15	23,91	8,00	24,93	64,93	0,18
36	Manggarai	5,59	3,88	1,59	4,17	4,41	6,75
37	Nagekeo	7,83	7,50	1,37	17,44	11,53	0,60
38	Ende	22,75	4,09	2,37	2,70	0,14	0,42
39	Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78
40	Flores Timur	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
41	Lembata	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
42	Alor	1,41	0,79	1,22	1,54	1,86	0,00
43	Sumba Timur	2,25	5,06	5,87	4,23	7,36	1,51
44	Kupang	6,17	27,25	6,86	18,40	13,36	71,05
45	Timor Tengah Utara	3,95	9,09	5,22	2,08	12,95	8,43
46	Minahasa Tenggara	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Pohuwato	28,85	0,00	0,00	0,00	8,76	25,22
48	Kota Palu	8,36	8,39	7,82	7,02	0,00	22,99
49	Pangkajene Kepulauan	76,63	148,67	18,11	92,41	69,98	1,18
50	Takalar	13,81	12,15	4,82	15,64	19,37	0,28
51	Jeneponto	108,93	155,81	11,08	23,09	187,32	5,03
52	Selayar	0,00	0,00	0,00	8,11	10,05	0,10
<b>Rata-rata produktivitas nasional</b>		<b>83,46</b>	<b>57,35</b>	<b>24,53</b>	<b>135,34</b>	<b>162,02</b>	<b>12,70</b>

### Gambaran Umum Program PUGaR 2017

Pada tahun anggaran 2017 intervensi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam program PUGaR berada di 15 kabupaten, dengan total luas lahan yang mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2017 sebesar 257,07 Hektar. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9 dan Gambar 10.

## Peta Sebaran Lahan Tambak Garam



Gambar 9. Peta sebaran lahan tambak garam



Gambar 10. Peta luas lahan integrasi tahun 2017

Program PUGaR 2017 merupakan kelanjutan dari program PUGaR pada tahun-tahun sebelumnya. Komponen kegiatan utama dalam program PUGaR tahun 2017 adalah Integrasi Lahan Tambak Garam dan Pembangunan Gudang Garam Nasional.

Integrasi lahan tambak garam merupakan pendekatan penyatuan pengelolaan lahan tambak garam rakyat yang luasannya dibawah 5 hektar, menjadi satu kesatuan pengelolaan dalam satu hamparan yang memiliki luasan minimal 15 hektar. Penyatuan lahan ini dimaksudkan agar tercapainya peningkatan produktivitas lahan pergaraman dan keseragaman mutu/kualitas garam tambak rakyat. Adapun lokasi desa dan kecamatan penerima bantuan Integrasi Lahan Garam pada tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada table 12 dibawah ini.

Tabel 12. Luas, Desa dan Koperasi Pengelola Lahan Integrasi 2017

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas Lahan (Ha)	Pengelola	
Jawa Barat	1	Indramayu	Kec. Losarang	Ds. Karimun	18.64 Ha	Koperasi Mina Garam Rejeki Agung
	2	Cirebon	Kec. Kapetakan	Ds. Bungko	18.53 Ha	Koperasi Muara Jati
Jawa Tengah	3	Rembang	Kec. Kaliori	Ds. Purworejo	17.99 Ha	Koperasi Guyup Rukun
	4	Pati	Kec. Balangan	Ds. Raci	15.12 Ha	Koperasi Mutiara Laut Mandiri
	5	Demak	Kec. Wedung	Ds. Babalan	15.33 Ha	Koperasi Garam Laut
	6	Brebes	Kec. Tanjung	Ds. Pengaradan	18.54 Ha	Koperasi Mutiara Fajar Harapan
Jawa Timur	7	Tuban	Kec. Palang	Ds. Ketambul	17.16 Ha	Koperasi PUGAR Ronggolawe Makmur
	8	Sumenep	Kec. Pragaan	Ds. Sentol Daya	16.51 Ha	Koperasi Sumber Asri Sejahtera
	9	Sampang	Kec. Sreseh	Ds. Disanah	19.60 Ha	RumDesGar Karoma h
	10	Lamongan	Kec. Sidomukti	Ds. Labuan	16.82 Ha	Koperasi Garam Lamongan
	11	Pamekasan	Kec. Pademawu	Ds. Padelegan	15.69 Ha	KSU Teratai Laut
NTB	12	Bima	Kec. Lambu	Ds. Soro	18.28 Ha	PD Wawo
NTT	13	Kupang	Kec. Sulamu	Ds. Bipolo	16.63 Ha	BumDes Bipolo
Sulawesi Selatan	14	Pangkep	Kec. Lambu	Ds. Soro	18.09 Ha	Koperasi Mappat uo
	15	Jeneponto	Kec. Arunglele	Ds. Boronlamu	15.71 Ha	KOPRAS Utama
<b>TOTAL</b>					<b>285.55</b>	

Berikut melalui Gambar 11 dan Gambar 12 ditampilkan contoh lahan integrasi yang difasilitasi oleh PUGar tahun 2017.



Gambar 11. Lahan integrasi di Kabupaten Indramayu



Gambar 12. Lahan integrasi di Kabupaten Brebes

## Gudang Garam

Pembangunan gudang garam nasional merupakan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga stok logistik garam sehingga harga garam pada saat panen raya tidak jatuh ke titik terendah, serta petambak tetap dapat mendapatkan akses keuangan dengan menggunakan Resi Gudang yang dapat dijadikan penjamin pinjaman kepada perbankan. Komponen pergudangan, sarana dan prasarana garam ditunjukkan pada Gambar 13.



Gambar 13. Proses Pembangunan Gudang dan Sarana Pendukung

Selain kedua komponen kegiatan besar tersebut, terdapat juga pengadaan bantuan pemerintah berupa plastik geomembran, armada angkutan garam, escavator, timbangan dan sarana-prasarana tambak garam lainnya. Bantuan-bantuan pemerintah diserahkan kepada koperasi pengelola Gudang Garam, sebagaimana yang terlampir pada Tabel 13.

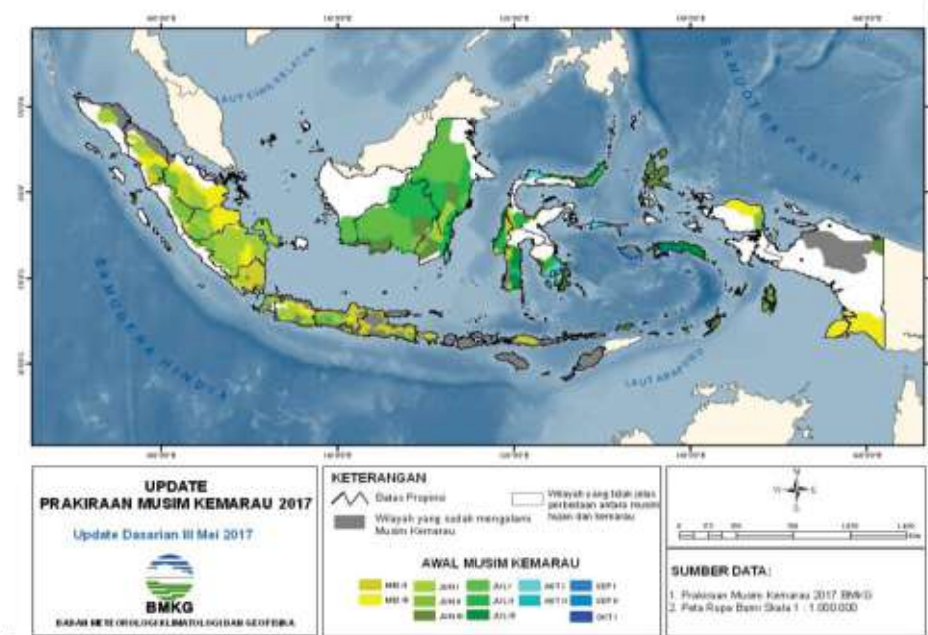
Pemberian bantuan pemerintah kepada petambak garam pada tahun 2017 dialokasikan melalui Anggaran Tugas Perbantuan (TP) 2017, yang jenis dan alokasinya sebagai berikut pada Tabel 13. Pada tabel tersebut ditampilkan bahwa kotak berwarna biru berarti kabupaten/kota mendapatkan bantuan berupa jenis yang ada pada Tabel 13 sedangkan kotak yang berwarna putih menunjukkan bahwa kabupaten/kota tidak mendapatkan bantuan jenis bantuan seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Distribusi jenis bantuan per kabupaten PUGaR 2017

No	Kabupaten	Integrasi Lahan	Gudang Garam	Plastik Geomembra	Bak Penampungan	Saluran Air	Pompa Air	Pengerasan Jalan	Timbangan	Angkutan garam
1.	Cirebon									
2.	Indramayu									
3.	Brebes									
4.	Demak									
5.	Rembang									
6.	Pati									
7.	Tuban									
8.	Lamongan									
9.	Pamekasan									
10.	Sampang									
11.	Sumenep									
12.	Bima									
13.	Kupang									
14.	Jeneponto									
15.	Pangkep									

### Kondisi Prakiraan Cuaca

Proses produksi garam sangat ditentukan oleh kondisi musim kemarau, yang pada tahun 2017 ini diperkirakan oleh BMKG musim kemarau tahun 2017 dimulai pada bulan Mei. Adapun peta perkiraan musim kemarau pada tahun 2017 ini, diperlihatkan pada Gambar 14.



Gambar 14. Peta Prakiraan dan Kondisi Ekisting Kemarau 2017

Pada awal bulan Mei – Juni 2017 musim kemarau telah terjadi di beberapa wilayah seperti NTT, NTB, Utara Jawa Timur seperti Madura, dan beberapa wilayah lainnya. Hal ini menandakan dimulainya proses produksi garam pada lahan garam rakyat.




Berikut disajikan tabel prakiraan musim kemarau yang diolah dari laporan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geografi) untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2017. Berdasarkan data curah hujan tersebut diatas maka, dapat disimpulkan bahwa rata-rata musim kemarau pada tahun 2017 adalah Normal, untuk wilayah Jawa Barat berkisar 3 s/d 5 bulan, Jawa Timur berkisar antara 4 s/d 6 bulan dan NTT 5 s/d 7 bulan.



Tabel 14. Prakiraan Musim Kemarau

No	Curah Hujan	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		a	b	c	d	e	F
1.	Cirebon						
2.	Indramayu						
3.	Karawang						
4.	Brebes						
5.	Jepara						
6.	Demak						
7.	Pati						
8.	Rembang						
9.	Tuban						
10.	Lamongan						
11.	Surabaya						
12.	Pamekasan						
13.	Sampang						
14.	Sumenep						
15.	Bangkalan						
16.	Bima						
17.	Kupang						
18.	Pangkep						
19.	Jeneponto						

**Keterangan**

 200 - 400 mm /s  
 100 - 200 mm/s  
 0 - 100 mm/s

Tinggi  
 Sedang  
 Rendah



# Bab IV

## Target Produksi dan Realisasi PUGaR 2017

Pada awal tahun penyusunan anggaran tahun 2017, dengan mengacu pada data produktivitas sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, serta prakiraan cuaca dari BMKG, maka ditetapkanlah target produksi garam nasional 2017 sebesar 3,8 juta ton dan target kualitas garam KP1 (NaCl minimal 97 %) sebesar 60% yakni 2,28 juta ton, dengan target luasan lahan garam yang difasilitasi sebesar 10.000 Ha. Target produksi tersebut diatas selanjutnya digunakan sebagai indikator utama kinerja program PUGaR 2017, sebagaimana yang tercatat didalam Program Nasional sektor Kelautan dan Perikanan 2017.

Realisasi PUGaR pada tahun 2017 yang dikumpulkan dengan metode statistik maupun laporan sensus dari dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota penerima bantuan seperti yang ditampilkan pada Tabel 15. Berdasarkan data target dan realisasi tersebut diatas, maka dapat diketahui besarnya prosentase ketercapaian target seperti pada Tabel 16. Berdasarkan persentase Tabel 15 dan Tabel 16 maka rata-rata ketercapaian target terhadap realisasi luasan lahan garam hanya 53% dan realisasi ketercapaian target dan realisasi produksi adalah 7%

Tabel 15. Target Produksi Dan Realisasi Luas Lahan Dan Produksi Per Kabupaten

No	Satuan Kerja	Target		Realisasi	
		Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon	3,858	443,670	1,435	63,363
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indramayu	2,714	312,110	2,714	168,768
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang	1,566	180,394.75	1,580	93,491
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak	1,271	127,100	1,271	48,364
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes	430	43,000	430	13,729
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati	2,383	326,382.77	2,838	115,639
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan	213	19,170	206	28,237
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sampang	3,064	352,423	2,775	113,639
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pamekasan	929	106,835	914	54,832
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumenep	2,066	237,820	1,597	232,293
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tuban	272.06	24,485	273	21,527
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jenepono	434.66	49,485.40	183	3,644
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pangkep	420.96	48,985.90	409	5,475
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	1,734.02	200,447.30	1,743	92,537
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kupang	54.78	6,299.70	55	2,074
<b>Total</b>		<b>21,679.81</b>	<b>2,478,536.77</b>	<b>18,423</b>	<b>1,057,220</b>

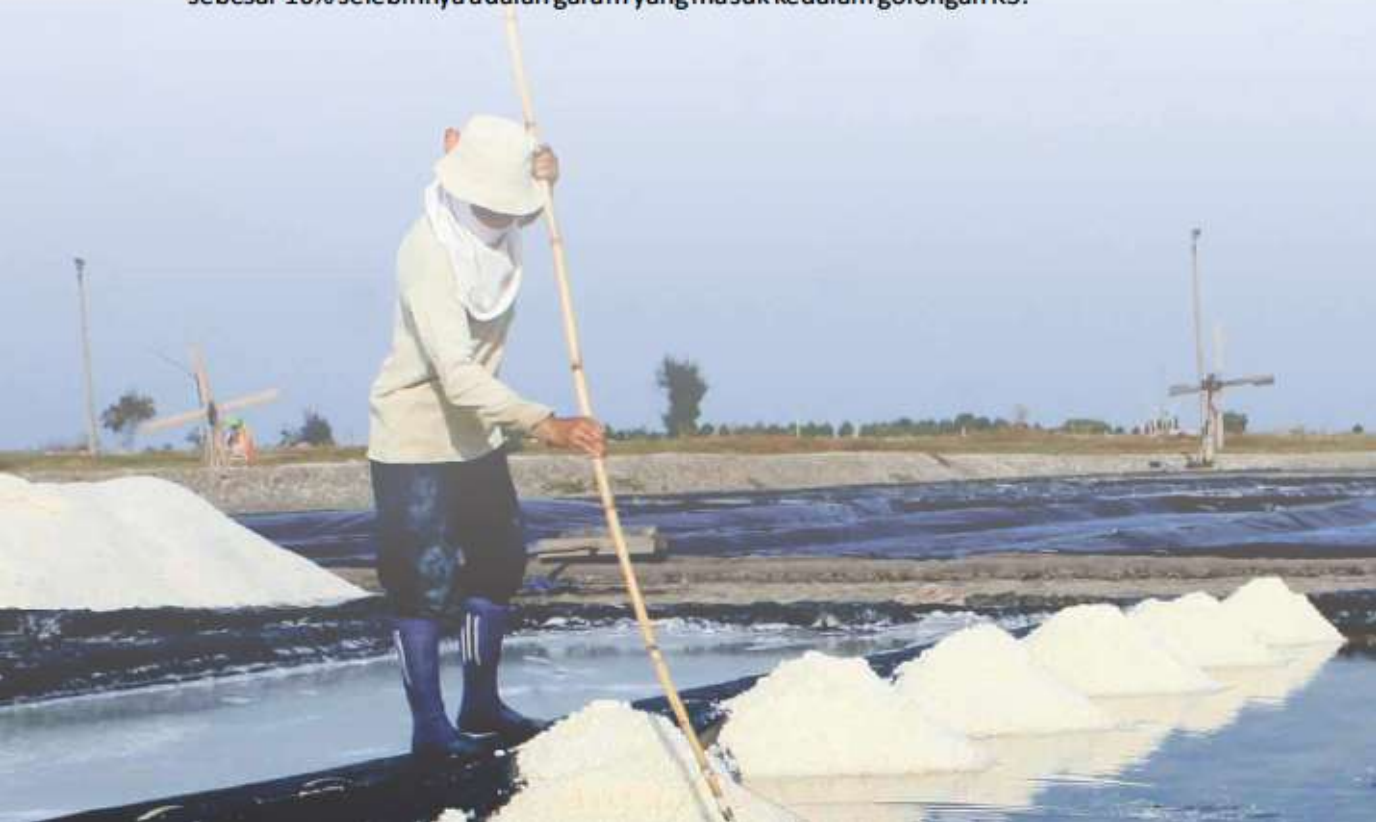


Tabel 16. Ketercapaian target

No	Satuan Kerja	Persentase Ketercapaian Lahan	Persentase Ketercapaian Produksi
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon	37%	14%
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indramayu	100%	54%
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang	101%	52%
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak	100%	38%
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes	100%	32%
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati	100%	35%
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan	97%	147%
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sampang	91%	32%
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pamekasan	98%	51%
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumenep	77%	98%
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tuban	100%	88%
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jenepono	42%	7%
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pangkep	97%	11%
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	100%	46%
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kupang	100%	33%

### Kualitas Garam

Kualitas garam sebagaimana yang ditetapkan dalam SNI 4435:2017, tentang Garam Bahan Baku untuk Garam Konsumsi Beriodium seperti ditunjukkan pada Gambar 15. Kualitas produksi garam rakyat yang memiliki klasifikasi K1 pada tahun 2017 adalah sebesar 166,344.72 ton, atau sebesar 16% dari target sebesar 60%. K2 sebesar 10% selebihnya adalah garam yang masuk kedalam golongan K3.



Gambar 15. Persyaratan mutu garam konsumsi

SNI 4435:2017

Tabel 1 - Persyaratan mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium

No	Parameter uji	Satuan	Persyaratan		
			Kualitas K1	Kualitas K2	Kualitas K3
1	Keadaan: - Bau - Wama	- -	normal, tidak berbau putih normal	normal, tidak berbau putih sampai putih kecoklatan	normal, tidak berbau selain warna K1 dan K2
2	Natrium Klorida (NaCl), adbk	fraksi massa, %	min. 94	min. 90	min. 85
	Natrium Klorida (NaCl), edbb	fraksi massa, %	min. 87	min. 83	min. 78
3	Kadar air (H <sub>2</sub> O)	fraksi massa, %	maks. 7	maks. 7	maks. 7
4	Bagian yang tidak larut dalam air, adbk	fraksi massa, %	maks. 0,5	maks. 0,75	maks. 1,00
5	Cemaran logam				
5.1	Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 10,0	maks. 10,0	maks. 10,0
5.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	maks. 0,5	maks. 0,5	maks. 0,5
5.3	Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,1	maks. 0,1	maks. 0,1
5.4	Arsen (As)	mg/kg	maks. 0,1	maks. 0,1	maks. 0,1
<p>CATATAN 1 fraksi massa adalah bobot/bobot.                      CATATAN 2 adbk adalah atas dasar berat kering.                      CATATAN 3 edbb adalah atas dasar berat basah.</p>					
<b>5 Pengambilan contoh</b>					
Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428.					
<b>6 Persiapan contoh uji</b>					
Ambil 300 g contoh, haluskan dan tempatkan dalam wadah kaca yang bersih dan kering untuk dijadikan sebagai contoh uji organoleptik dan kimia.					
<b>7 Cara uji</b>					
<b>7.1 Keadaan</b>					
<b>7.1.1 Bau</b>					
<b>7.1.1.1 Prinsip</b>					
Melakukan analisa terhadap contoh uji secara organoleptik dengan menggunakan hidung sebagai indra penciuman.					
<b>7.1.1.2 Prosedur</b>					
a. Ambil contoh uji sebanyak 50 g dan letakkan diatas cawan petri yang bersih dan kering; b. Cium contoh uji untuk mengetahui baunya; c. Lakukan pengerjaan minimal oleh tiga panelis terlatih atau satu orang tenaga ahli.					
© BSN 2017 <span style="float: right;">2 dari 12</span>					

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional. Copy standar ini dibuat untuk penunjang di www.bsn.go.id dan tidak untuk di komersialkan"

## Kebijakan Pergaraman

Dikotomi Garam Konsumsi dan Garam Industri seringkali menimbulkan persoalan bagi petani garam nasional, coba bayangkan jika ada dikotomi Gula Konsumsi - Gula Industri, Beras Konsumsi - Beras Industri, atau Cabai Konsumsi - Cabai Industri, untungnya hanya garam, dan persoalan ini harus segera ditindaklanjuti sehingga petani garam nasional dapat terlindungi.

Dikotomi garam konsumsi dan garam industri diindikasikan sebagai penyebab ketidakpastian harga garam petambak. Dikotomi ini juga seringkali menjadi alat bagi

pembeli untuk menentukan harga serendah-rendahnya terutama saat panen raya sehingga petambak garam tidak pernah mendapatkan nilai lebih atas keberhasilannya.

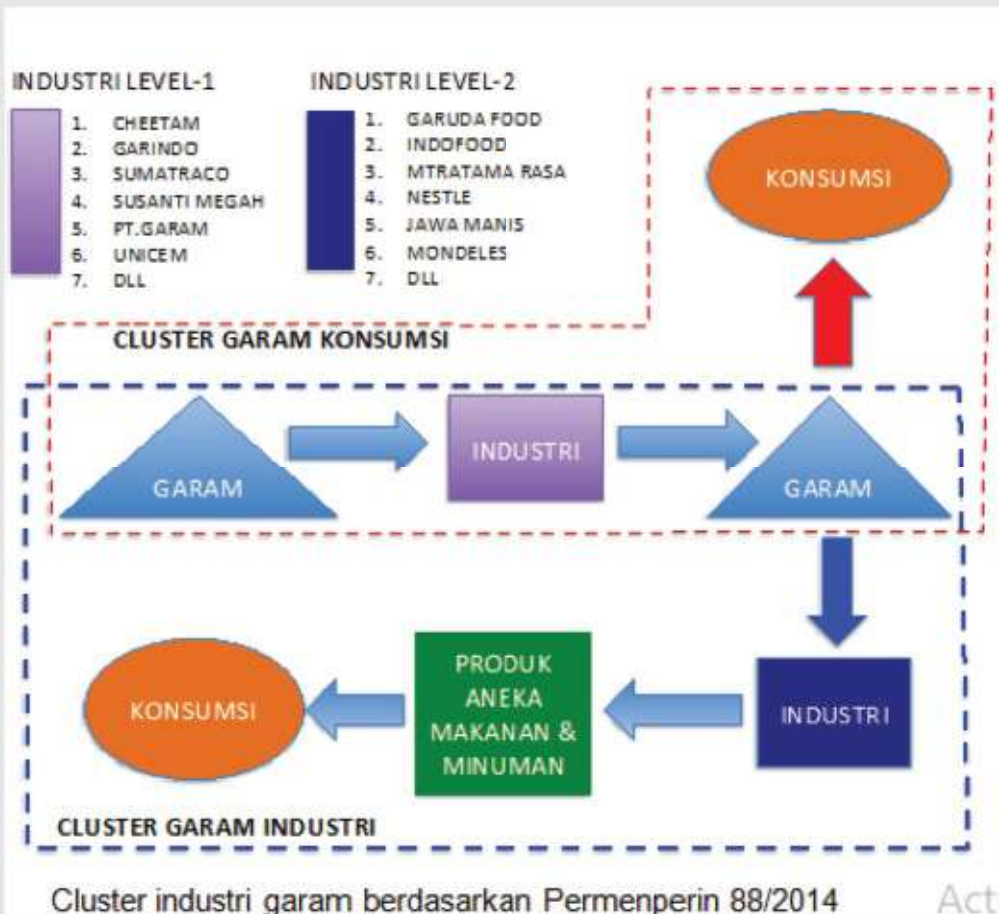
Kebijakan garam konsumsi vs garam industri lahir dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 88 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kluster Industri Garam. Kebijakan peraturan menteri tersebut seharusnya diterapkan setelah garam menjadi produk kemasan, bukan pada saat garam masih menjadi bahan baku, karena jelas didalamnya diatur kandungan bahan campuran Kalium Iodate atau dikenal Garam ber-Yodium didalamnya yang tidak akan ada didalam garam hasil panen petambak garam.

Dan bilamana melihat penjelasan atas garam industri dalam kebijakan tersebut, justru garam produksi petambaklah yang memungkinkan untuk memenuhi kriteria atau persyaratan menjadi garam baku untuk kebutuhan industri.

Selama ini, logika yang diterapkan kepada petambak garam rakyat terbalik, dan tentu hal ini menjadikan harga garam petambak dapat ditentukan sepihak oleh konsumen industri.

Garam adalah garam sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi bahan baku utama maupun bahan baku *intermediate*/antara untuk menghasilkan produk olahan lain.





## Hirarki Pengelolaan Garam Nasional



- Penguatan produksi garam nasional
- Pemberdayaan Petambak Garam
  - Rekayasa teknik lahan garam
  - Perluasan/ekstensifikasi lahan tambak garam
  - Penguatan infrastruktur lahan garam

### Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Landasan :

- UU No.07/2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- UU No 01/2014 tentang Perubahan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



### Hirarki Pertama



## Hirarki Pertama

Garam dalam UU No 01/2014 tentang Perubahan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa Produksi Garam adalah sumberdaya Kelautan Perikanan (KKP) yang kewenangan pemanfaatan dan pengelolaannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk itu adalah menjadi tanggung jawab KKP untuk melindungi petambak garam, nelayan dan pembudidaya ikan dari resiko-resiko kegagalan dan limpasan produk impor salah satunya garam. Lahirlah UU No.07/2016 sebagai instrumen perlindungan bagi petambak garam.

Pada hirarki pertama ini tidak dikenal / tidak ada perbedaan klasifikasi garam konsumsi dan garam industri, parameter garam yang digunakan adalah produksi dan kualitas/kadar NaCl basis basah.

Peran pemerintah pada hirarki pertama adalah dengan melakukan pendampingan, penguatan dan pemberian bantuan sarana-prasarana pada lahan garam, guna meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas garam.

## Hirarki Kedua

Pada hirarki kedua garam masuk kedalam kluster industri pengolahan garam yang berada pada kewenangan Kementerian Perindustrian sebagaimana yang telah diamanatkan didalam UU No.03/2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian No.64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

## Hirarki Ketiga

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa demikian yang diamanatkan didalam Undang-Undang 07/2014 tentang Perdagangan. Pada tataran ini, Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan terhadap transaksi garam dan/atau Jasa pergaraman yang dihasilkan dari hirarki ke dua.

Pada hirarki ketiga ini juga yang mengatur transaksi masuknya produk Garam dari luar wilayah Indonesia, bilamana pada hirarki pertama tidak mampu mensuplai kebutuhan hirarki kedua.



Jadi dapat disimpulkan bahwa Data stock garam nasional yang absah (reliable) adalah data yang diterbitkan dari hirarki pertama. Sedangkan pada hirarki kedua yang diterbitkan adalah data kebutuhan garam industri pengguna dan pengolah garam. Ketidak seimbangan data pada hirarki kedua dan hirarki pertama ini selanjutnya menjadi acuan bagi keputusan regulatif dari hirarki ketiga untuk menyeimbangkan supply-demand.



# Daftar Pustaka

Bakosurtanal, (2011). *Informasi Geospasial Lahan Garam di Indonesia*. Pusat Survey Sumberdaya Alam Laut, Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2016). *Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam angka Tahun 2016*. Jakarta

